

Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

2022

PERDA KAB. TABALONG NO. 9 LD 2022/No.9 TLD NO. 6, 73HLM.

PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Abstrak : - Dalam rangka meningkatkan derajat kehidupan masyarakat pada kawasan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, serta dalam rangka mempercepat kesejahteraan masyarakat di Daerah sesuai dengan tujuan Otonomi Daerah. Pertumbuhan dan Pembangunan wilayah yang kurang memperhatikan keseimbangan bagi kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah mengakibatkan kesulitan masyarakat untuk memperoleh Rumah yang layak dan terjangkau.

- Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah UU No. 05 Tahun 1960, UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 39 Tahun 1999, UU No. 28 Tahun 2002, UU No. 26 Tahun 2007, UU No. 32 Tahun 2009, 25 Tahun 2009, UU No. 01 Tahun 2011, UU No. 20 Tahun 2011, UU No. 02 Tahun 2012, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 30 Tahun 2014, UU No. 11 Tahun 2020, PP No. 26 Tahun 2008, PP No. 34 Tahun 2008, PP No. 34 Tahun 2009, PP No. 88 Tahun 2014, PP No. 64 Tahun 2016, PP No. 45 tahun 2017, PP No. 16 Tahun 2021, PP No. 19 Tahun 2021, PP No. 21 Tahun 2021, PP No. 22 Tahun 2021, Permen Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 14/PTR/M/2018, Permen Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN No. 19 Tahun 2021, Perda Kab. Tabalong No. 19 Tahun 2014, Perda Kab. Tabalong No. 09 Tahun 2009, PerdaKab. Tabalong No. 05 Tahun 2016, Perda Kab. Tabalong No. 04 Tahun 2019.
- Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh, tujuan, ruang lingkup, acuan, Kewajiban dan Tugas Pemerintah Daerah, Kriteria dan Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru, Bentuk Pengawasan dan Pengendalian, Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian, Pemberdayaan Masyarakat, Pendampingan, Pelayanan Informasi, Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan ymuh dan Pemukiman Kumuh, Penyediaan Tanah, Pola Koordinasi, Kerjasama, Peran serta Masyarakat dan Kearifan Lokal, Larangan, Pendanaan, Sanksi Administratif, Ketentuan Penyidikan Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

Catatan : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 29 Desember 2022 dan ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2022.

- Penjelasan 6 hlm.